



Potensi
**USAHA
MIKRO
KECIL**
PROVINSI ACEH



Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI ACEH



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL
SENSUS EKONOMI 2016**

No. ISBN: 978-602-71290-4-7
No. Publikasi: 11560.1805
No. Katalog: 9102067.11

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm
Jumlah Halaman: vi + 34 halaman

Naskah: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Aceh

Penyunting: Bidang IPDS BPS Provinsi Aceh

Desain Kover oleh: Bidang IPDS BPS Provinsi Aceh

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Tata Letak: Bidang IPDS BPS Provinsi Aceh

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

<https://aceh.bps.go.id>

Tim Penyusun

Pengarah
Wahyudin

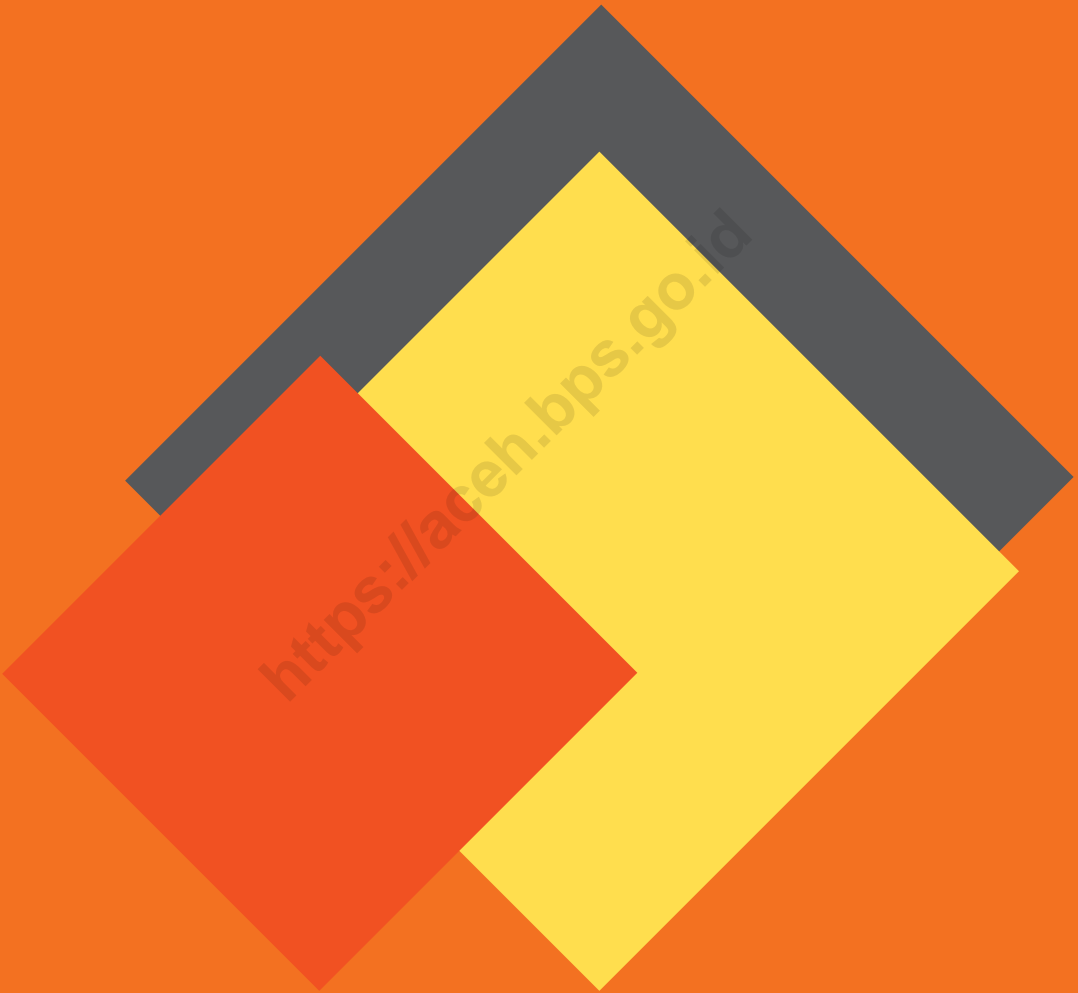
Penanggungjawab
Kenda Paryatno
Andariati Afrida
Oriza Santifa

Editor
Sekretariat SE2016

Penulis
Sekretariat SE2016

Desain dan *Layout*
IPDS

Kontributor Data
Sekretariat SE2016



Kata Pengantar



Pada tahun 2016, BPS Aceh telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Banda Aceh, Desember 2018
Kepala BPS Provinsi Aceh

Wahyudin



Daftar Isi

KATA PENGANTAR _____	III
DAFTAR ISI _____	V
PENDAHULUAN _____	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI PROVINSI ACEH _____	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK _____	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA _____	11
PELAKU UMK PERLU MENINGKATKAN KAPABILITAS KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN _____	17
PROSPEK DAN KENDALA USAHA _____	27



Pendahuluan

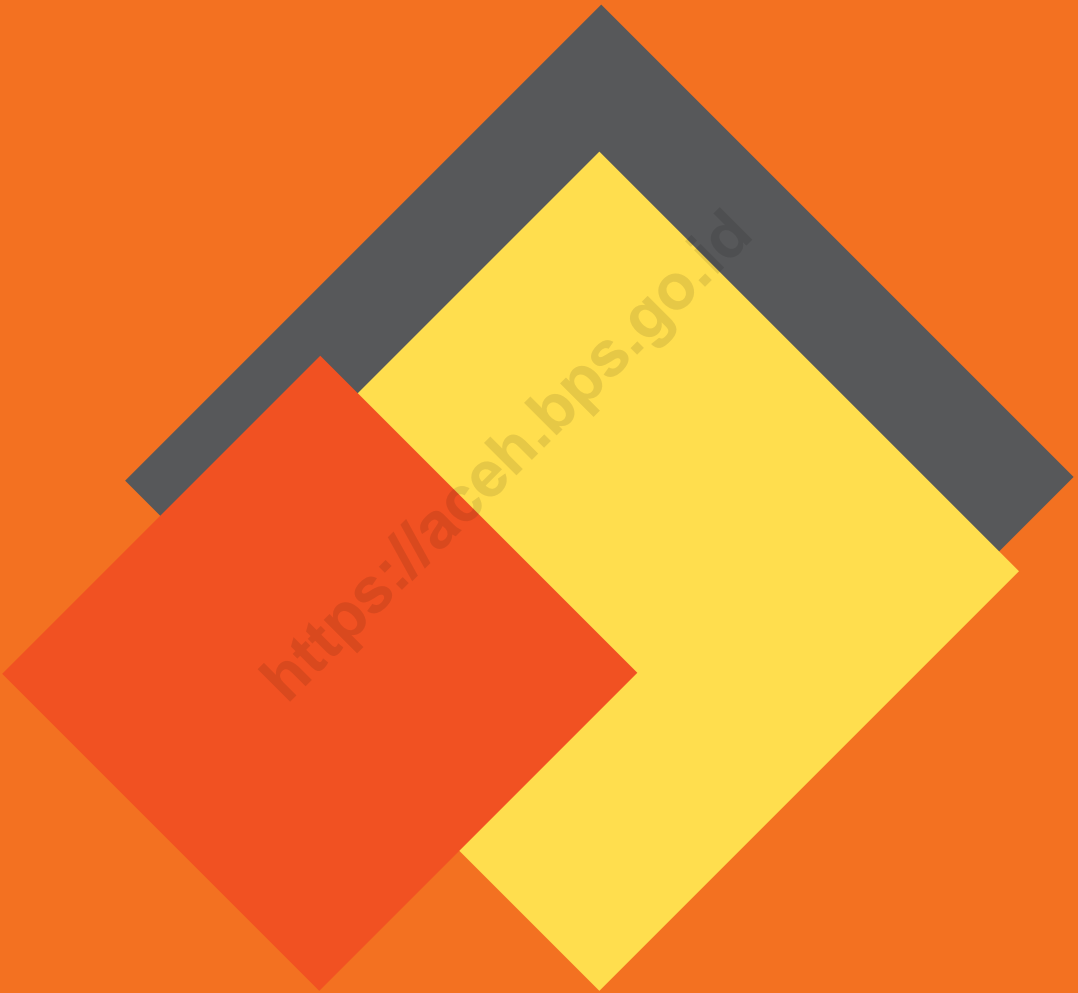
Dunia usaha di Provinsi Aceh pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 422 ribu usaha atau 98,97 persen dari total usaha nonpertanian di Provinsi Aceh. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 1,06 juta orang atau sekitar 90,54 persen dari total tenaga kerja nonpertanian.

Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh. Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Provinsi Aceh, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



<https://aceh.bps.go.id>

**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
PROVINSI Aceh**

Bagian

1

<https://aceh.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Provinsi Aceh. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Oleh sebab itu, mayoritas UMK di Provinsi Aceh beroperasi secara komersil kurang dari 10 tahun.

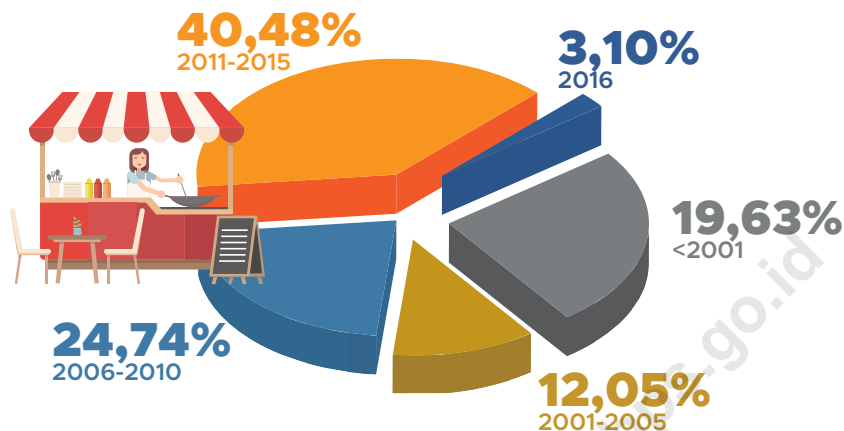
Persentase UMK di Provinsi Aceh mencapai 98,97 persen dari total jumlah usaha nonpertanian yang tercatat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah hampir mencapai 190 ribu usaha atau mencapai lebih dari 44,97 persen. usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-

masing berkontribusi sekitar 20,57 persen dan 15,76 persen.

Kabupaten Aceh Utara merupakan Kabupaten dengan jumlah UMK terbanyak, yaitu sebesar lebih dari 49 ribu usaha atau 11,69 persen. sedangkan kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota provinsi Aceh hanya menduduki urutan kelima UMK terbanyak, yaitu lebih dari 28 ribu usaha atau 6,68 persen. Kota Sabang adalah Kota dengan jumlah UMK paling sedikit, yaitu hampir 4 ribu usaha atau sebesar 0,93 persen dari total jumlah UMK di Aceh.

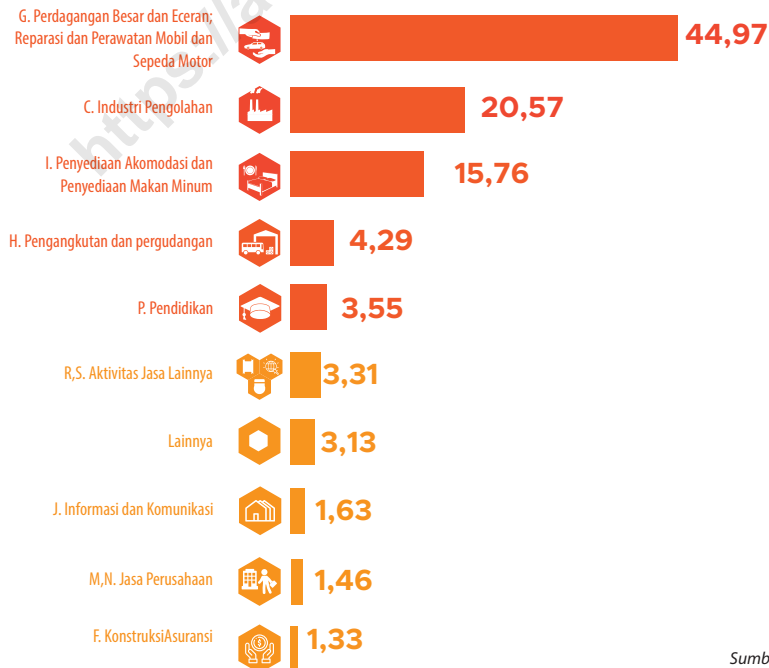
UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
PROVINSI ACEH

Gambar 1.
Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Beroperasi, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2.
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-L

Tabel 1.
Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2017

Kabupaten/Kota	Persentase (%)
SIMEULUE	1,56
ACEH SINGKIL	2,78
ACEH SELATAN	4,44
ACEH TENGGARA	3,50
ACEH TIMUR	6,45
ACEH TENGAH	3,58
ACEH BARAT	3,91
ACEH BESAR	7,44
PIDIE	8,16
BIREUEN	8,60
ACEH UTARA	11,69
ACEH BARAT DAYA	2,84
GAYO LUES	3,17
ACEH TAMIANG	5,31
NAGAN RAYA	2,46
ACEH JAYA	1,62
BENER MERIAH	2,21
PIDIE JAYA	3,04
BANDA ACEH	6,68
SABANG	0,93
LANGSA	4,02
LHOKSEUMAWE	4,22
SUBULUSSALAM	1,39
ACEH	100,00

Sumber: BPS, SE2016-L



**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2

<https://aceh.bps.go.id>

Jumlah UMK yang sangat besar di Provinsi Aceh tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas 2017, pengangguran di Provinsi Aceh mencapai 6,57 persen, terbanyak pada lulusan SLTA yang mencapai 10,95 persen disusul dengan lulusan SMK yang mencapai 10,74 persen. Tingginya kontribusi lulusan SMK dan SLTA terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Aceh salah satu alasannya adalah karena memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Berbeda untuk tingkatan pendidikan SLTP kebawah cenderung tidak memilih jenis pekerjaan sehingga kontribusi lulusan ini terhadap pengangguran kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah.

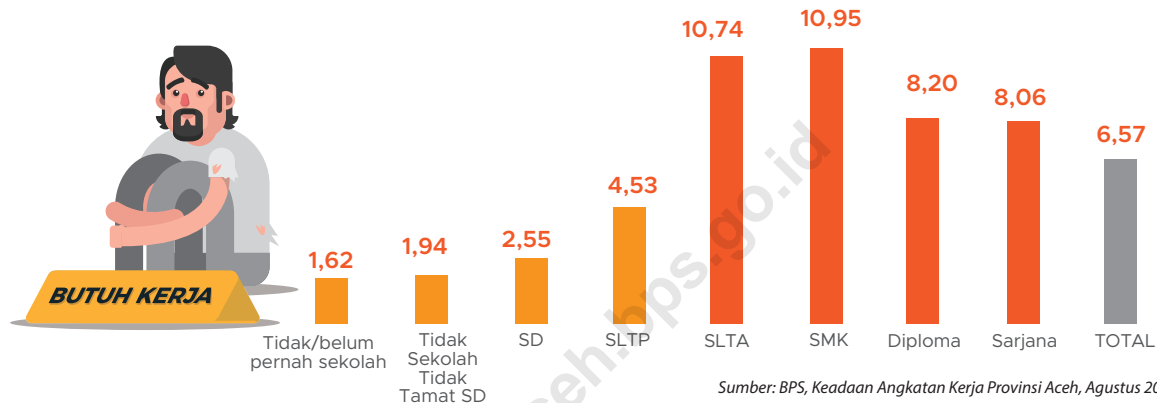
Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki *skill* tinggi. Data SE2016 Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 1,06 juta jiwa atau

90,54 persen tenaga kerja nonpertanian di Provinsi Aceh.

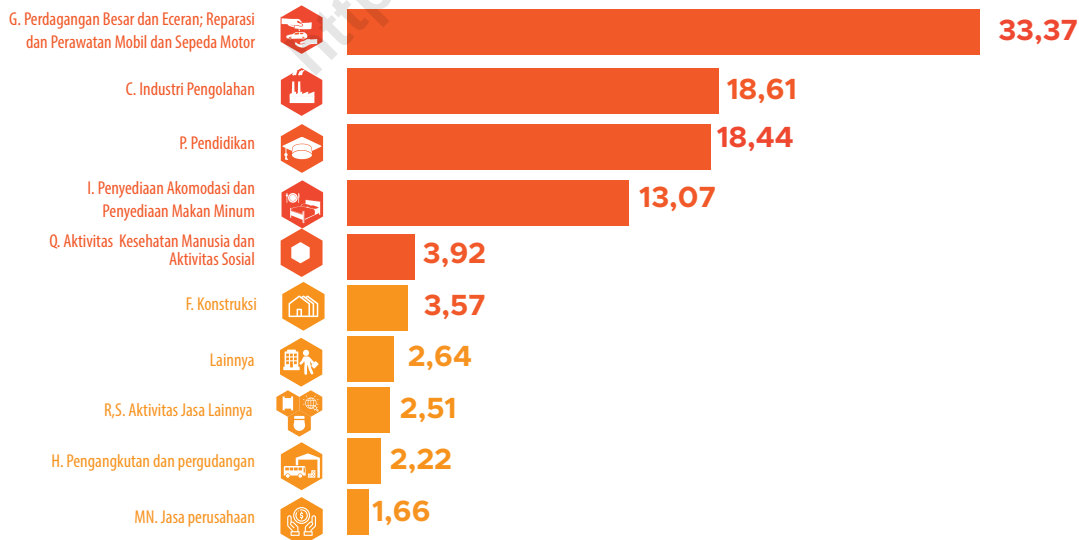
Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) lebih dari 354 ribu jiwa atau mencapai lebih dari 33,37 persen dari tenaga kerja pada UMK. Usaha Industri Pengolahan (kategori C) dan usaha Pendidikan (kategori P) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK, yaitu sebesar 18,61 persen dan 18,43 persen. Secara-rata-rata per usaha, UMK kategori Pendidikan (kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 13 pekerja per usaha. Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Provinsi Aceh hanya sebesar 3 pekerja.

**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK**

Gambar 3.
Tingkat Pengangguran Provinsi Aceh menurut Pendidikan, 2017



Gambar 4.
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 2.
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori, 2017

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
BDE. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	2.623	5.936	2
C. Industri Pengolahan	86.912	197.533	2
F. Konstruksi	5.618	37.870	7
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	189.986	354.137	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	18.122	23.521	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	66.587	138.654	2
J. Informasi dan Komunikasi	6.881	10.564	2
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.021	5.744	6
L. Real Estat	4.775	5.761	1
M,N Jasa Perusahaan	6.183	17.589	3
P. Pendidikan	14.989	195.670	13
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	4.805	41.615	9
R,S. Lainnya	13.967	26.623	2
Total	422.469	1.061.217	3

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3

<https://aceh.bps.go.id>

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

UMK di Provinsi Aceh memiliki karakteristik *informal*, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, bantuan pemasaran, pengadaan bahan baku, dan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari data SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukum dan penggunaan teknologi. Di Provinsi Aceh, jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi yaitu mencapai lebih dari 90 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain

produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, hanya sekitar 6 persen UMK yang menggunakan komputer dan hanya sekitar 8 persen UMK yang menggunakan internet.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, program ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 10 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Di antara sektor nonpertanian di Provinsi Aceh, UMK Aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dsan Sepeda Motor dan Pendidikan yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan usaha, penggunaan internet, dan penggunaan komputer. Sementara dari aspek menjalin kemitraan, hampir semua kategori belum menjalin kemitraan secara optimal.

Gambar 5.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 7.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha, 2016



Gambar 8.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2016



Tabel 3.
Persentase UMK yang Berbadan Hukum, Mempunyai Laporan Keuangan, Menggunakan Komputer, dan Menjalinkan Kemitraan, 2016

Kategori	Berbadan Usaha	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet	Menjalinkan Kemitraan
BDE. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	25	442	459	422
C. Industri Pengolahan	4.803	1.551	3.194	8.516
F. Konstruksi	524	541	558	652
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	16.881	5.814	10.636	21.604
H. Pengangkutan dan Pergudangan	900	190	314	1.147
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.671	928	2.594	3.395
J. Informasi dan Komunikasi	445	2.332	2.536	914
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	656	656	334	202
L. Real Estat	106	122	132	57
M,N. Jasa Perusahaan	1.455	2.563	2.056	1.107
P. Pendidikan	11.052	8.299	6.129	2.678
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.861	1.175	1.184	1.051
R,S. Lainnya	1.261	1.235	1.605	734
Total	43.640	25.848	31.731	42.479

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan





**PELAKU
UMK
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

Bagian

4



Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan sekitar 17 persen UMK dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Kategori yang paling banyak dibantu buruh tidak dibayar adalah aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) dan aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I).

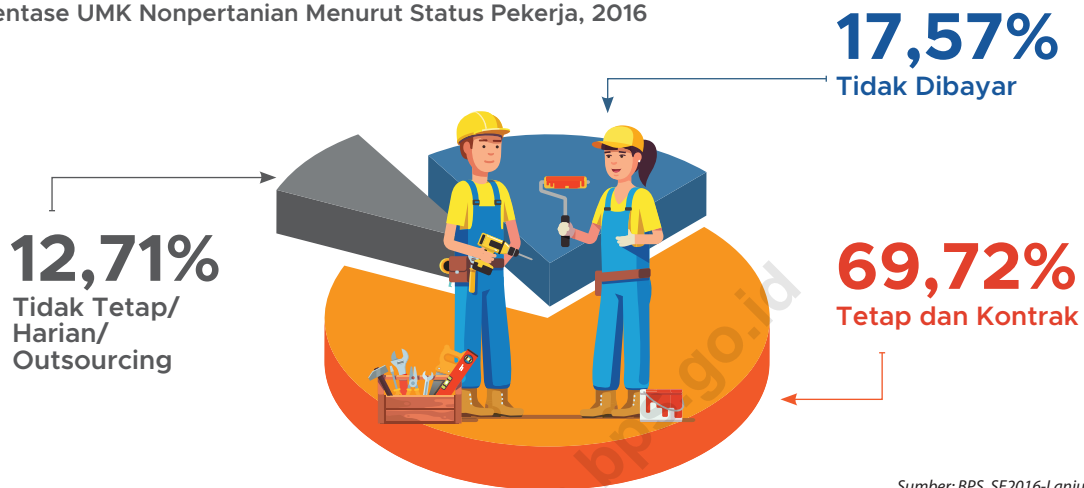
Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 39,54 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya stereotip bahwa laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika

UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Sekitar 37 persen pengelola berpendidikan SMA urutan terbanyak pertama diantara jenjang pendidikan lainnya. Pengelola dengan pendidikan SMP dan SD ke bawah mencapai setengahnya, bahkan untuk pengelola SD kebawah mencapai hampir sepertiganya. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, seperti memberikan pelatihan. Sayangnya, Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa pelaku UMK yang pernah mengikuti pelatihan hanya 5,02 persen.

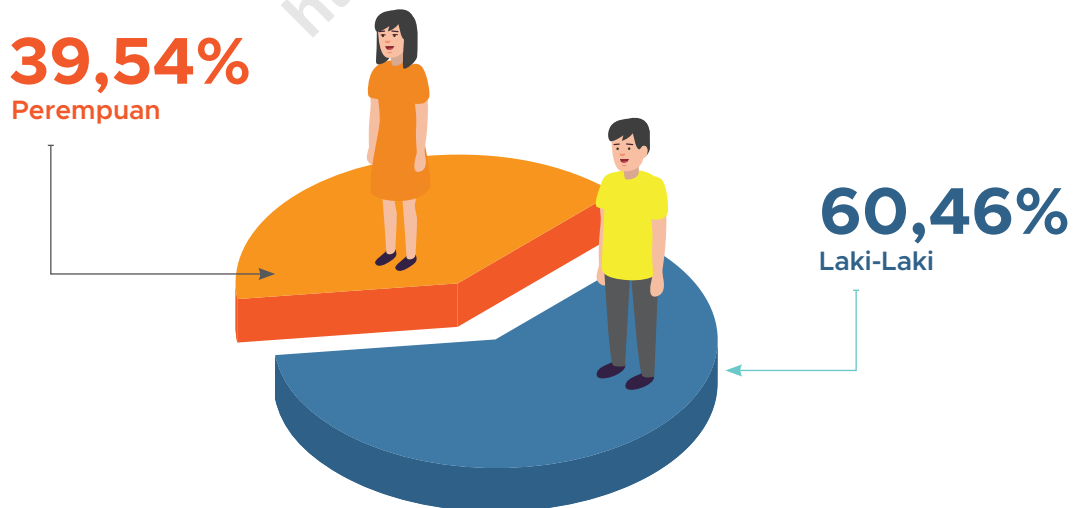
**PELAKU
UMK
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

Gambar 9.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Pekerja, 2016



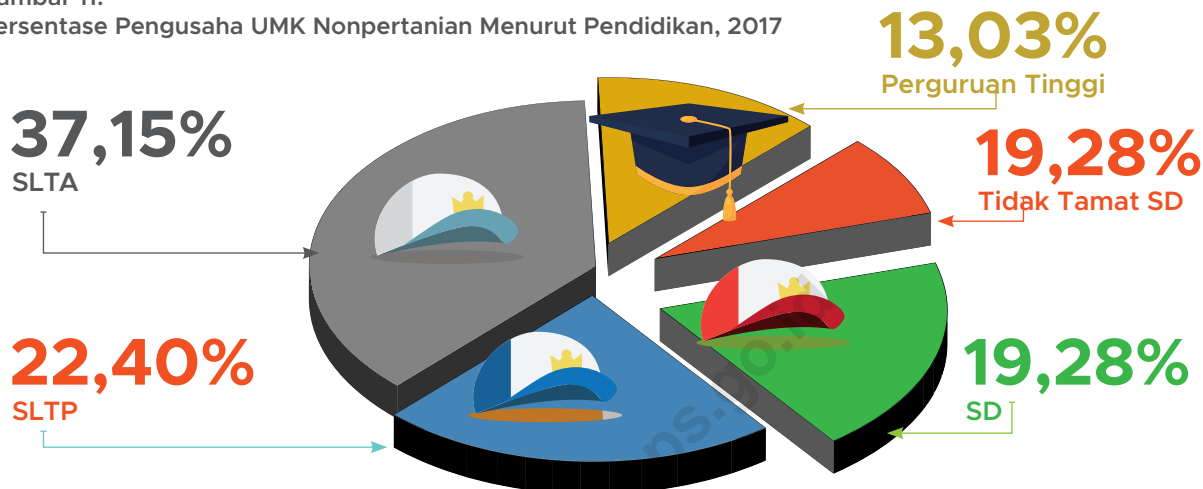
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 10.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 11.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Pekerja, 2016

Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/Harian/ Outsourcing	Tidak Dibayar
BDE. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,55	0,87	0,36
C. Industri Pengolahan	17,05	26,44	19,15
F. Konstruksi	1,66	18,98	0,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	32,68	19,86	45,86
H. Pengangkutan dan Pergudangan	2,73	1,94	0,38
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	12,52	7,06	19,58
J. Informasi dan Komunikasi	1,13	0,24	1,01
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0,53	0,14	0,88
L. Real Estat	0,68	0,06	0,35
M,N. Jasa Perusahaan	1,62	2,75	1,03
P. Pendidikan	21,80	16,37	6,62
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	4,27	2,34	3,69
R,S. Lainnya	2,78	2,95	1,10
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**KINERJA
USAHA
DARI SISI
KEUANGAN**

Bagian

5

<https://aceh.bps.go.id>

Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif meskipun beberapa usaha dipandang mengalami penurunan. Sekitar sepertiga UMK di Provinsi Aceh menyatakan bahwa keuntungan usaha mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat, sektor UMK Provinsi Aceh mampu menghasilkan omset/pendapatan mencapai lebih dari Rp 94,76 triliun.

Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap pendapatan (*cost to income*) juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada gambar 14 dapat terlihat bahwa UMK di Kabupaten Gayo Lues adalah yang paling *profitable* di Provinsi Aceh dengan rasio 0,53. Sebaliknya, rasio pengeluaran tertinggi ada di Kabupaten Pidie dengan rasio 0,71.

Jika dicermati lebih jauh menggunakan

kategori lapangan usaha, kategori L (Real Estat) dan kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,29 dan 0,37. UMK pada kategori-kategori tersebut mampu mendulang pendapatan hingga sekitar tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sedangkan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi disematkan pada Kategori Pendidikan dengan rasio mencapai 0,90.

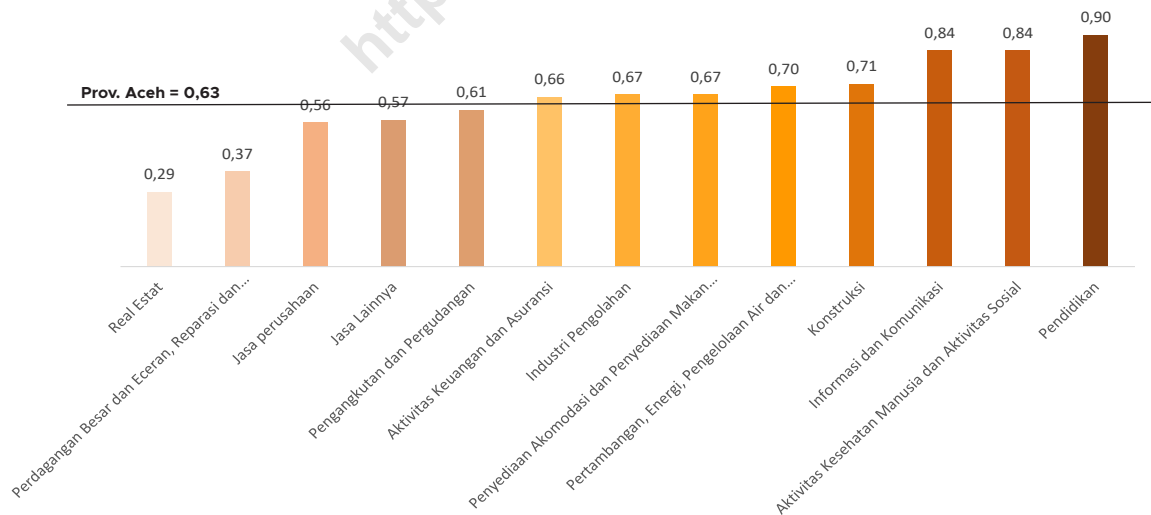
Namun demikian, Kategori, L, dan G bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi. Aktivitas Kategori Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial) memberikan balas jasa pekerja tertinggi yaitu lebih dari 28 juta per pekerja.

Gambar 12.
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 13.
Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

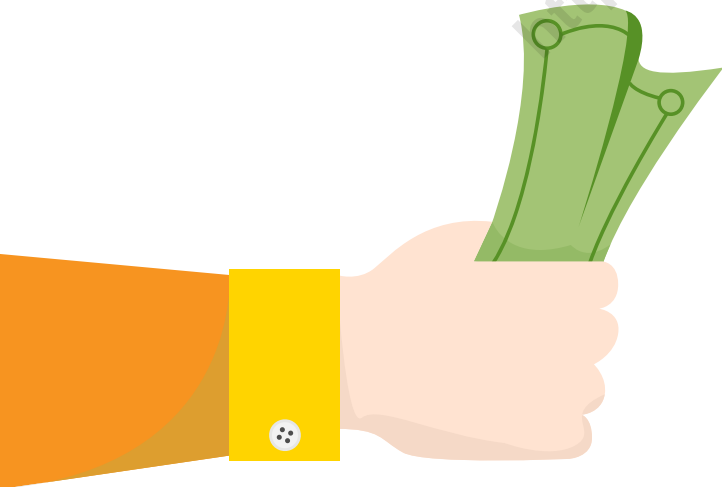
Gambar 14.
Peta Sebaran UMK menurut Kinerja Keuangan Tertinggi dan Terendah di Provinsi Aceh, 2017



Tabel 5.
Balas Jasa dan Upah Pekerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori (Juta Rupiah), 2017

Kategori	Balas Jasa
BDE. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	53.827
C. Industri Pengolahan	1.388.567
F. Konstruksi	854.409
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.806.155
H. Pengangkutan dan Pergudangan	143.534
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	656.032
J. Informasi dan Komunikasi	33.089
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	49.098
L. Real Estat	5.107
M,N. Jasa Perusahaan	175.392
P. Pendidikan	4.668.230
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	895.756
R,S. Lainnya	207.267
Total	10.936.469

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan





PROSPEK DAN KENDALA USAHA

Bagian

6

<https://aceh.bps.go.id>

RPJMN 2015-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 29,52 persen.

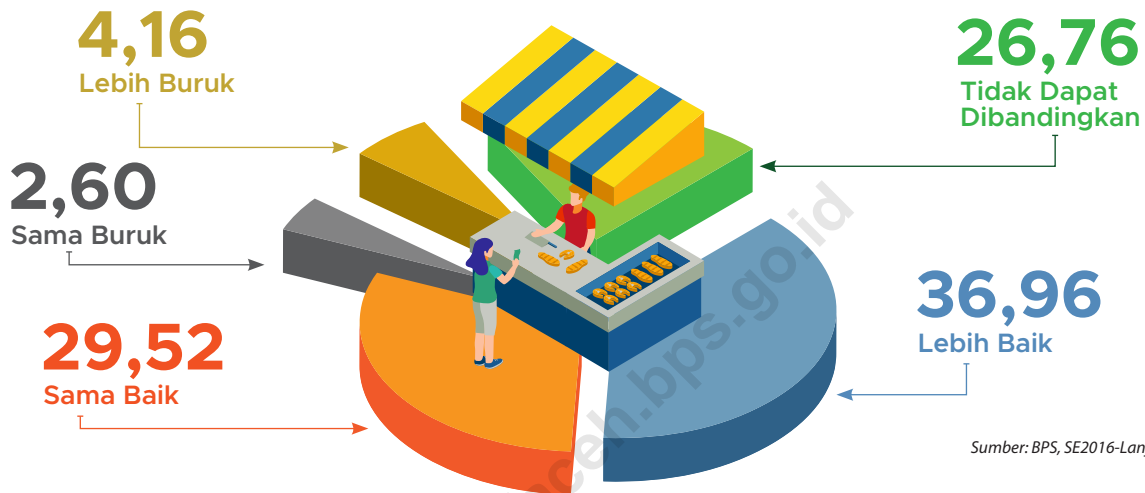
Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. UMK di Provinsi Aceh 80 persen memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Permasalahan permodalan/likuiditas dan adanya pesaing merupakan kendala utama yang dihadapi. Masing-masing sekitar 76 persen dan 45 persen pengusaha UMK menyatakan memiliki kendala tersebut.

Permodalan merupakan faktor utama yang ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses modal usaha dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses

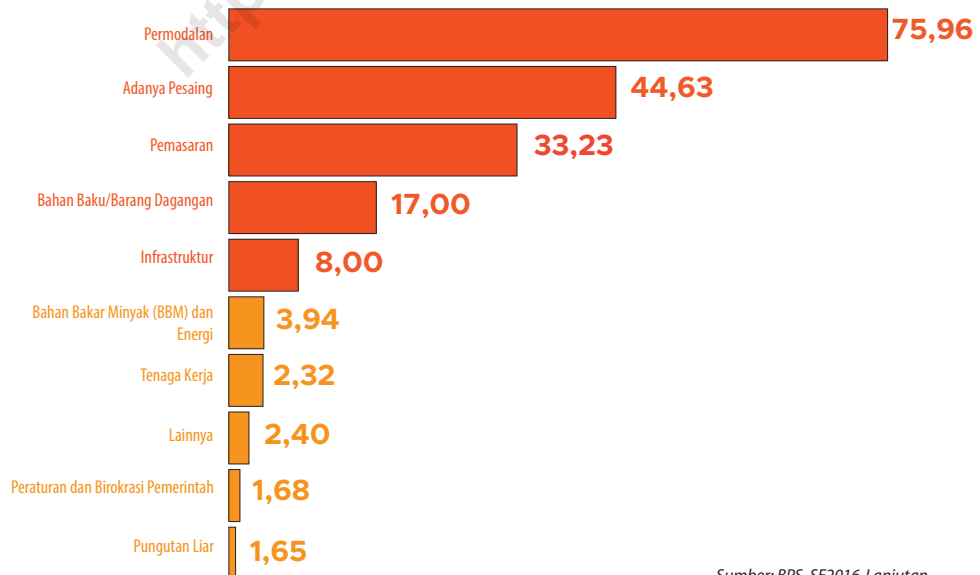
modal usaha untuk UMK sebetulnya sudah sangat terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit modal usaha yang meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMK (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Namun hanya sekitar 11 persen usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Alasan UMK tidak mengajukan kredit melalui lembaga keuangan utamanya adalah karena merasa bunga tinggi, yaitu sebanyak 68 persen dan karena tidak memiliki agunan sebanyak 33 persen.

**PROSPEK
DAN KENDALA
USAHA**

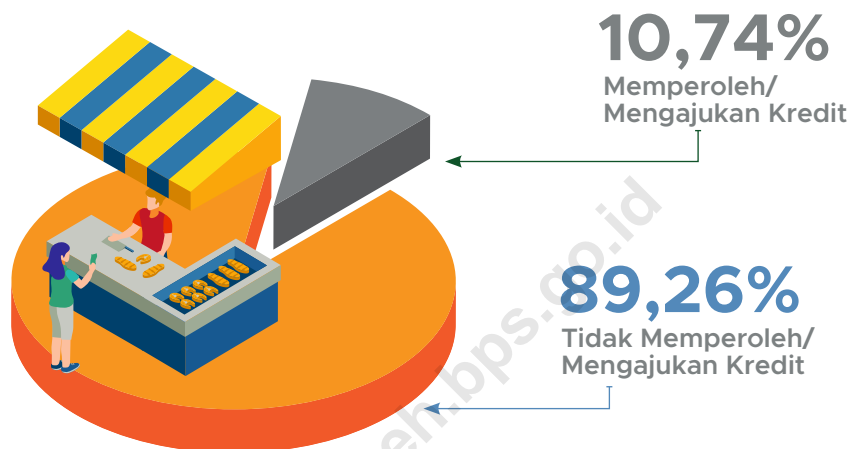
Gambar 15.
Persentase UMK Menurut Prospek UMK Tahun 2018



Gambar 16.
Persentase UMK Yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (Persen), 2017

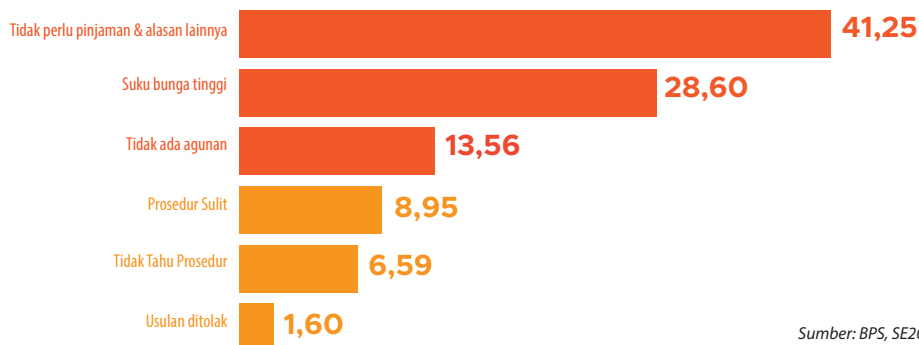


Gambar 17.
Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan, 2016

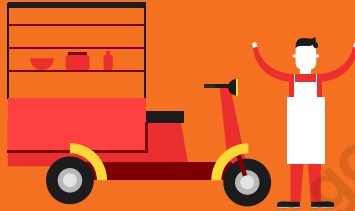


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 18.
Persentase UMK yang Tidak Memperoleh/Mengajukan Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



<https://aceh.bps.go.id>





<https://aceh.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

Jl. Tgk. H. M. Daud beureueh No.50, Kuta Alam, Banda Aceh
Telp : (0651) 23005, 33632, Fax : (0651) 33632

Homepage : <http://aceh.bps.go.id> E-mail : bps1100@bps.go.id